

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA SEMARANG)**

Yohanes Suhardjo

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Diterima: Agustus 2019, Disetujui: September 2019, Dipublikasikan: Oktober 2019

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the Quality of Regional Government Financial Statements that describe the financial position, financial condition and financial performance of local government.

This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 7 DPOs in Semarang City Government as many as 35 questionnaires distributed. The sample in this study was Semarang City Government ASN which was chosen as the respondent. The exogenous variables in this study are HR competency, SAKD and SPI while the endogenous variable is LKPD Quality. The sampling technique consists of two stages, namely the stage of determining OPD to be sampled and the stage of determining respondents on OPD as the sample object. The selection of respondents used a purposive sampling method. Data analysis uses the Partial Least Square (PLS).

The results of this study indicate that the HR competency variable does not affect the variable quality of LKPD. SAKD variable does not affect the quality variable LKPD. The SPI variable influences the quality of LKPD.

Keywords: Quality of Local Government Financial Reports, Human Resources Competencies, Regional Financial Accounting System, Internal Control System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan, kondisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada 7 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 35 kuesioner yang didistribusikan. Sampel dalam penelitian ini adalah ASN Pemerintah Kota Semarang yang dipilih menjadi responden. Adapun variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Kompetensi SDM, SAKD dan SPI sedangkan variabel endogennya yaitu Kualitas LKPD. Teknik pengambilan sampel meliputi 2 tahap yaitu tahap penentuan OPD yang menjadi sampel dan tahap penentuan responden pada OPD yang sebagai obyek sampel. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Variabel SAKD tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Adapun variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka bagi pemerintah daerah (pemda) menjadi kewajiban untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

LKPD berisi informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah. LKPD menggambarkan posisi keuangan, kondisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri RI nomor 64 tahun 2013, LKPD terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKPD akan digunakan oleh para pemakai yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Adapun para pemakai yang berkepentingan atas LKPD yaitu masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati keuangan sektor pemerintah.

Agar LKPD bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan maka LKPD tersebut harus berkualitas. LKPD disebut berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif. Jika LKPD memenuhi karakteristik kualitatif maka LKPD tersebut bermanfaat untuk pembuatan keputusan, misalnya keputusan perencanaan dan pengendalian keuangan. Karakteristik kualitatif LKPD terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Adapun uraian karakteristik kualitatif LKPD seperti berikut:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standard yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila informasi tersebut dapat diuji kebenarannya, netral, penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*).

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Mengacu pada uraian di muka, bisa disimpulkan bahwa LKPD yang berkualitas merupakan syarat agar LKPD memiliki manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah menjadi kewajiban dan kebutuhan bahwa LKPD yang disusunnya memenuhi kriteria berkualitas. Hal ini berarti LKPD yang berkualitas merupakan suatu keharusan.

Penelitian tentang kualitas LKPD sudah pernah dilakukan. Yensi dkk (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LKPD, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas LKPD. Nurillah dan Dul Muid (2014) dan Sadu Wibawa dkk (2017) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LKPD, yang hasilnya mendukung hasil penelitian yang dilakukan Yensi dkk. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) mengenai Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Yensi dkk (2014) juga menguji Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas LKPD, yang hasilnya

menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh: Rahayu dkk (2014), Nurillah dan Dul Muid (2014), Ningtyas dan Widyawati (2015), dan Yuliani dan Agustini (2016). Hasil penelitian-penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi dkk bahwa SAKD berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

Yensi dkk (2014) selain menguji pengaruh Kompetensi SDM dan SAKD Terhadap Kualitas LKPD, juga menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kualitas LKPD. Hasil penelitian Yensi dkk (2014) mengenai Pengaruh SPI terhadap Kualitas LKPD menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap Kualitas LKPD. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Dul Muid (2014), Shintia dan Erawati (2017) maupun Sadu Wibawa dkk (2017) yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

Uraian di muka menunjukkan bahwa terdapat *Research Gap* mengenai Pengaruh Kompetensi SDM, SAKD dan SPI Terhadap Kualitas LKPD. Hal ini menarik untuk diteliti kembali melalui penelitian lanjutan sebagai konfirmasi atas hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dalam rangka mengkonfirmasi kembali Pengaruh Kompetensi SDM dan SPI Terhadap Kualitas LKPD. Adapun penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang)”.

Perumusan Masalah

Kualitas LKPD merupakan hal urgen bagi pemerintah daerah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kualitas LKPD.

Pertanyaan Peneliti

Apakah Kompetensi SDM, SAKD dan SPI berpengaruh terhadap Kualitas LKPD?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Kompetensi SDM, SAKD dan SPI terhadap kualitas LKPD.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluruhan budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan produk aktif dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan.

Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah.

Tujuan laporan keuangan penting baik pada organisasi swasta maupun pada pemerintahan sehingga pemerintahan perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Menurut Bastian (2006) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatif diantaranya: dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan/reliabilitas, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta menunjukkan laporan keuangan sudah menuju kearah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk di pertanggungjawabkan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diderivasi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai Pedoman Penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kineja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi, 2005 dalam Yuliani dan Agustini, 2016). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menjelaskan serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjelaskan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAKD

memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi.

Dalam perusahaan, pengendalian intern dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak, dapat ditekan. Pengendalian intern tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan, tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian intern yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya.

Menurut Saputra (2015) keterkaitan antara sistem pengendalian inten dengan kualitas laporan keuangan yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah harus melalui proses dan tahap-tahap yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, menurut Inapty dan Martiningsih (2016) Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga merupakan suatu kegiatan pengendalian dalam mengelola sistem informasi dengan tujuan memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang dijalankan dengan maksimal akan mendorong sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal akan lebih berguna apabila didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintah sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan menjadi berkualitas.

Telaah Penelitian Terdahulu

Menurut Yensi dkk (2014) kompetensi sumber daya adalah kemampuan seorang individu, suatu organisasi, atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan laporan keuangan, SDM yang terkait harus memiliki kompetensi dalam

ilmu akuntansi agar laporan keuangan yang disusun memenuhi karakteristik kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) dalam Wibawa dkk (2018) dan Yensi dkk (2014) memberikan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini berarti bahwa semakin kompeten sumber daya manusia penyusun LKPD maka semakin tinggi kualitas LKPD, serta sebaliknya.

SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan terkait pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun SAKD yang selaras ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pemerintah daerah menetapkan SAKD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) dalam Wibawa dkk (2018) dan Yensi dkk (2014) menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. SPI menurut Shintia dan Erawati (2017) memiliki hubungan dengan kualitas LKPD. SPI bertujuan menjamin bahwa LKPD yang disusun dan disajikan pemerintah daerah berkategori wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku.

Perumusan Hipotesis

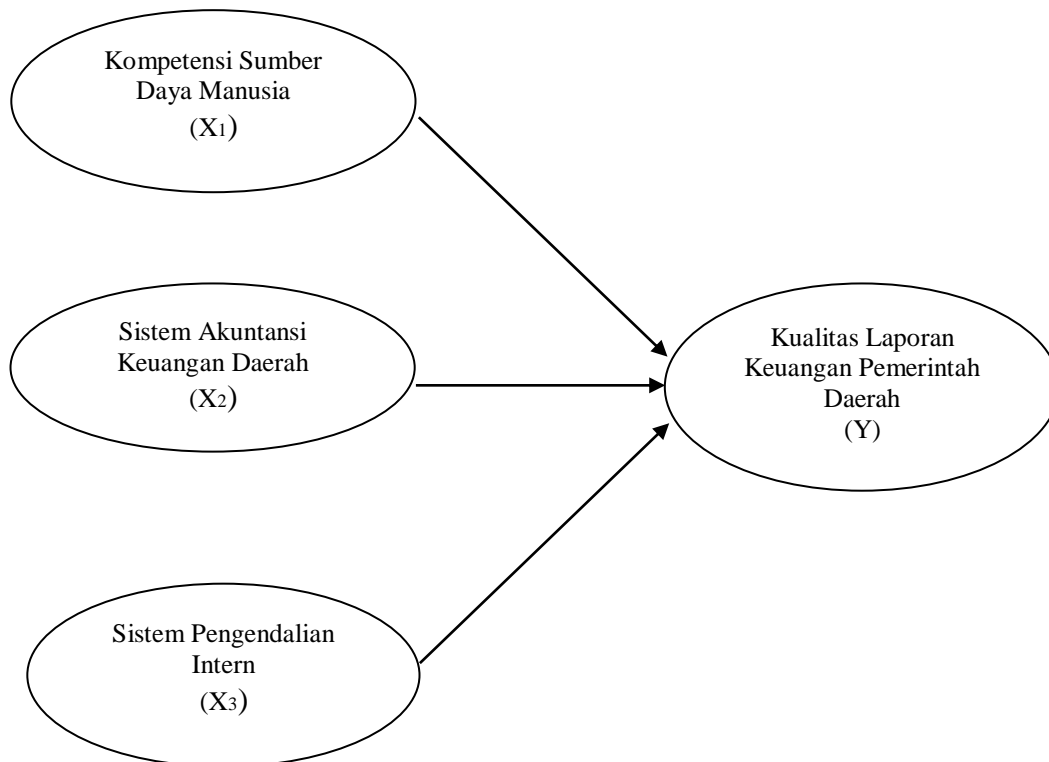
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

KERANGKA PEMIKIRAN

Model penelitian ini tampak pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen dan variabel endogen yaitu tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen. Adapun variabel eksogennya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sedangkan variabel endogennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dasar diukur operasional didalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah adalah informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai laporan keuangan. Variabel Kualitas LKPD dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Variabel Kompetensi SDM dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekusif yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisien operasi. Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

Tabel
Definisi Operasional

No	Nama Variabel	Definisi Vriabel	Indikator	Sumber
1.	Kualitas Laporan Keuanagn	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No.71 tahun2010 tentang SAP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. KetepatanWaktuan penyajian 2. Disajikan wajar dan jujur 3. Informasi dalam laporan, keuangan dapat dipahami 4. Informasi dapat dibandingkan 5. Sesuai SAP 	Yensi, Hasan dan Anisma 2014.
2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan ketrampilan, dansikap perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Pengalaman menjalankan SAKD 3. Ketersediaan pedoman Internal tentang sikap dan perilaku etika pelaksanaan 	Yensi, Hasan dan Anisma 2014

3.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi sesuai dengan SAP 2. Setiap Transaksi keuangan di dukung oleh Bukti Transaksi 3. Transaksi Keuangan dilakukan pencatatan aecara Kronologis 	Yensi Hasan dan Anisma 2014
4.	Sistem Pengendalian Intern	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadsi atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. (PP NO. 61 Tahun 2008).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian, penilaian Resiko, kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi dan Pemantuan. 	Yensi Hasan dan Anisma 2014.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun Sumber datanya adalah jawaban responden atas daftar pernyataan yang tercantum pada kuesioner penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang yang merupakan pegawai pada 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sampel penelitian ini adalah ASN Pemerintah Kota Semarang yang dipilih menjadi responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel meliputi 2 tahap yaitu tahap penentuan OPD yang dipilih menjadi unit sampel dan tahap penentuan responden pada OPD yang dipilih sebagai obyek sampel. Penentuan OPD menggunakan judgment sampling yaitu teknik penyampelan menggunakan kebijakan. Adapun kebijakannya adalah OPD yang dipilih sebagai unit sampel adalah OPD Fungsi Perencanaan, OPD Fungsi Keuangan, OPD Fungsi Pengelola Pendapatan, OPD Fungsi Pembangunan Sarana Prasarana Publik, OPD Fungsi Pengendalian/OPD Fungsi Pendidikan dan OPD Fungsi Kesehatan. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria menjadi responden yaitu ASN yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyusun laporan keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode survey. Dalam metode survey ini digunakan kuesioner yang berisi daftar pernyataan untuk dijawab responden. Responden diminta untuk menjawab dengan cara memilih yaitu sebanyak 5 (lima) pilihan yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju dan Sangat Setuju per item pernyataan.

Metode Analisis

Analisis Kualitas Data

Analisis kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dibagi menjadi dua yaitu:

1. Uji validitas konvergen indikator refleksi dengan program WarpPLS versi 3.0 dapat dilihat dari loading faktor untuk tiap indikator konstruksi.
2. Cara mengukur validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model.

Adapun uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WrapPLS versi 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksi dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* sering disebut *Dillon-Goldstein's* (Ghozali, 2012).

Analisis Outer Model

Outer Model sering juga disebut measurement model atau model pengukuran yang merupakan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini terdapat empat model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: a) Kompetensi Sumber Daya Manusia, b) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, c) Sistem Pengendalian Intern, dan d) Kualitas LKPD.

Analisis Inner Model

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dapat dilihat dari nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive.

PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka cara parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Chin, 1998) yang dikutip (Latan dan Ghozali, 2012). Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Indikator refleksi dievaluasi melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya. Sedangkan indikator formatif dievaluasi melalui *substantive content-nya* yaitu dengan membandingkan besarnya *relative wight* dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut Chin (1998) dalam (Latan dan Ghozali, 2012).

Evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya *presentase variance* yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Square untuk konstruk laten endogen, Stone Geisser (Geisser 1975; Stone 1974) test untuk menguji

predictive dan *average variance extracted* (Fornell dan Larcker 1981) dalam (Latan dan Ghozali, 2012) untuk *predictiveness* dengan menggunakan prosedur resampling seperti *jackknifing* dan *bootstrapping* untuk memperoleh stabilitas dari estimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek dalam penelitian ini adalah 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagian pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Berikut adalah data 7 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu:

Tabel 2

Daftar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

No.	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
3.	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya
5.	Inspektorat
6.	Dinas Pendidikan
7.	Dinas Kesehatan

Deskripsi Responden

Pengumpulan data berupa metode survey menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang telah diberikan kepada responden sebanyak 5 kuesioner per OPD sehingga jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 35 kuesioner. Hasil pengumpulan data ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	35 eksemplar
Kuesioner yang diterima kembali	31 eksemplar
Kuesioner tidak lengkap atau cacat	4 eksemplar
Kuesioner yang dapat digunakan	31 eksemplar

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dari sebanyak 35 eksemplar kuesioner yang didistribusikan, yang kembali sebanyak 31 eksemplar kuesioner. Dari jumlah tersebut ada kuesioner yang tidak lengkap atau cacat sebanyak 4 eksemplar kuesioner.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilihat melalui variabel konstruk dinilai dengan menggunakan konvergen dan validitas diskriminan. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai validitas konvergen adalah nilai *loading factor* harus lebih dari 0,6 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *factor* antara 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (Chin, 1998 dalam Latan dan Ghozali, 2012).

Tabel 3 AVE

Average variances extracted			
KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
0.859	0.734	0.712	0.870

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2019

Hasil uji validitas konvergen seperti tampak pada Tabel 3 di muka menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun nilai AVE yang menunjukkan angka lebih kecil dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen penelitian ini terpenuhi.

Adapun hasil uji validitas diskriminan terdapat pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 4 Cross Loading

	KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
X1.1	(0.969)	0.241	0.267	-0.005
X1.2	(0.888)	0.219	0.292	0.052
X1.3	(0.956)	0.218	0.294	0.018
X1.4	(0.934)	0.287	0.340	0.018
X1.5	(0.884)	0.270	0.383	0.107
X2.1	0.357	(0.879)	0.523	-0.033
X2.2	0.162	(0.860)	0.600	-0.008
X2.3	0.235	(0.829)	0.482	-0.044
X2.4	0.156	(0.859)	0.579	0.025
X3.1	0.355	0.580	(0.851)	0.415
X3.2	0.371	0.471	(0.863)	0.371
X3.3	0.279	0.433	(0.868)	0.282
X3.4	0.129	0.683	(0.791)	0.107
Y1.1	-0.075	-0.057	0.186	(0.916)
Y1.2	0.144	-0.021	0.374	(0.916)
Y1.3	0.041	0.025	0.420	(0.967)

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2019

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa data bersifat valid. Hal ini sesuai hasil uji bahwa *cross loading* diatas 0,6.

Dalam penelitian ini reliabilitas konstruk akan diukur menggunakan *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,7 dan *cronbach alpha* > 0,7 (Laten dan Ghazali, 2012).

Tabel 5 Composite Reliability

Composite reliability coefficients			
KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
0.968	0.917	0.908	0.953

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 6 Cronbach Alpha

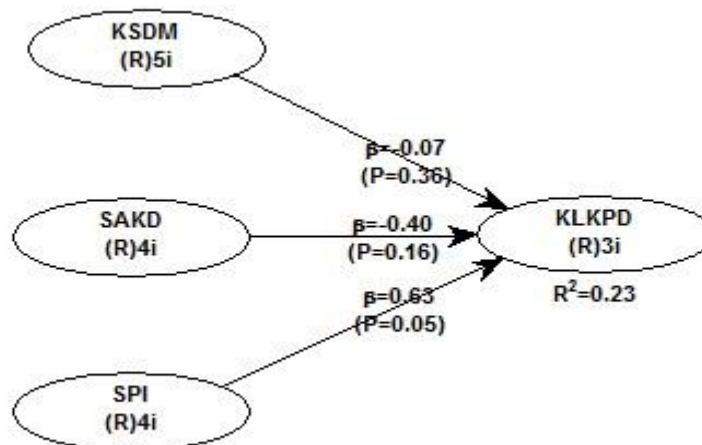
Cronbach alpha coefficients			
KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
0.959	0.879	0.865	0.925

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, *composite reliability* menunjukkan masing-masing nilai variabel diatas 0,7 dan *cronbach alpha* juga menunjukkan nilai variabel diatas 0,7. Dari nilai yang ada tersebut, menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa *reliability* instrumen terpenuhi.

Hasil Pengujian Outer Model

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi dan parameter *path* antara variabel laten. Hipotesis yang diajukan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang dihipotesiskan.



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Gambar 2
Korelasi Antar Konstruk

Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi dari model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 P Value & Path Coefficients

P values				
	KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
KSDM				
SAKD				
SPI				
KLKPD	0.356	0.161	0.049	

Path coefficients				
	KSDM	SAKD	SPI	KLKPD
KSDM				
SAKD				
SPI				
KLKPD	-0.068	-0.402	0.631	

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel *path coefficients* dan P-Values dimuka dapat diketahui pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Hal ini bisa diketahui dari angka P-Value yang sebesar 0,356 yang berarti lebih besar dari 0,05. Variabel SAKD tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Hal ini bisa diketahui dari angka P-Value yang sebesar 0,161 yang berarti lebih besar dari 0,05. Adapun nilai P-Value variabel SPI sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Hasil Pengujian Inner Model

Dalam menilai model *structural* dengan WarpPLS 3.0, dapat dilihat dari nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model *structural*. . Berikut akan disajikan tabel nilai *R-Squares*:

Tabel 8 R-Squared

R-squared coefficients				
KSDM	SAKD	SPI	KLKPD	
			0.227	

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengujian model struktural dalam penelitian ini menunjukkan angka 0,227 atau sama dengan 22,7% .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah instrumen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan faktor yang mempengaruhinya.

Keterbatasan Penelitian

Unit sampel kurang representatif sebagai akibat jumlah unit sampel yang relatif sedikit.

Agenda Penelitian yang akan Datang

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel eksogen yang diduga berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan, "Hasil Pemeriksaan atas LKPD di Indonesia tahun 2017"
BPK, Jakarta. <http://www.bpk.go.id/>.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit: Erlangga.
Jakarta.
- Harvesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government.
<http://www.osc.state.ny.us>.

Inapty, M. Ali Fikri Biana dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9, no. 1 (2016): h. 27-42.

Kuangan, Dewan Standar Akuntansi. "Standar Akuntansi Keuangan." *Jakarta Salemba Empat* (2009)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Saputra, Berry Wan. 2015. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM.FEKON* Vol 2, No. 2.

Taylor, S.E. 2006. Psikologi Sosial. Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga

Nurillah, Syifa dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 1, Nomor 1, Halaman 2.

Yensi, Sefri, Dr. H. Amir, dan Yuneita Anisma. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOM FEKON* Vol. 1 No. Oktober 2014.

Yuliani, Nur Laila dan Rahmawati Dwi Agustini. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14, Nomor 1, April 2016